

# MUATAN DOKUMEN PROJECT OPERATION MANUAL (POM)

Oleh: Kepala Pusat Pengembangan Kawasan  
Strategis, BPIW Kementerian PUPR

Disampaikan dalam acara:  
Pada Rapat Pembahasan ESMF dalam  
dokumen POM

19 September 2018

# PRASYARAT EFEKTIF LOAN ITDP

- Tertera pada “**Dokumen Technical Discussion Draft 19 April 2018 Loan Agreement ITDP**”, article IV poin 4.01, bahwa:
  - *The additional Condition of Effectiveness consist of the following namely, that, **the Borrower has adopted the Project Operation Manual inform** and substance satisfactory to the Bank*
- Tertera pada dokumen *Agreed Minutes of Technical Discussion ITDP* tertanggal 19 April 2018, poin 9 bahwa:
  - **the final version of the Manual will be submitted to the Bank for its approval prior to Loan Effectiveness**

# DOKUMEN PROJECT OPERATION MANUAL

Dokumen Project Operation Manual atau POM, terdiri dari:

## 1. Dokumen Panduan Umum (Pedum)

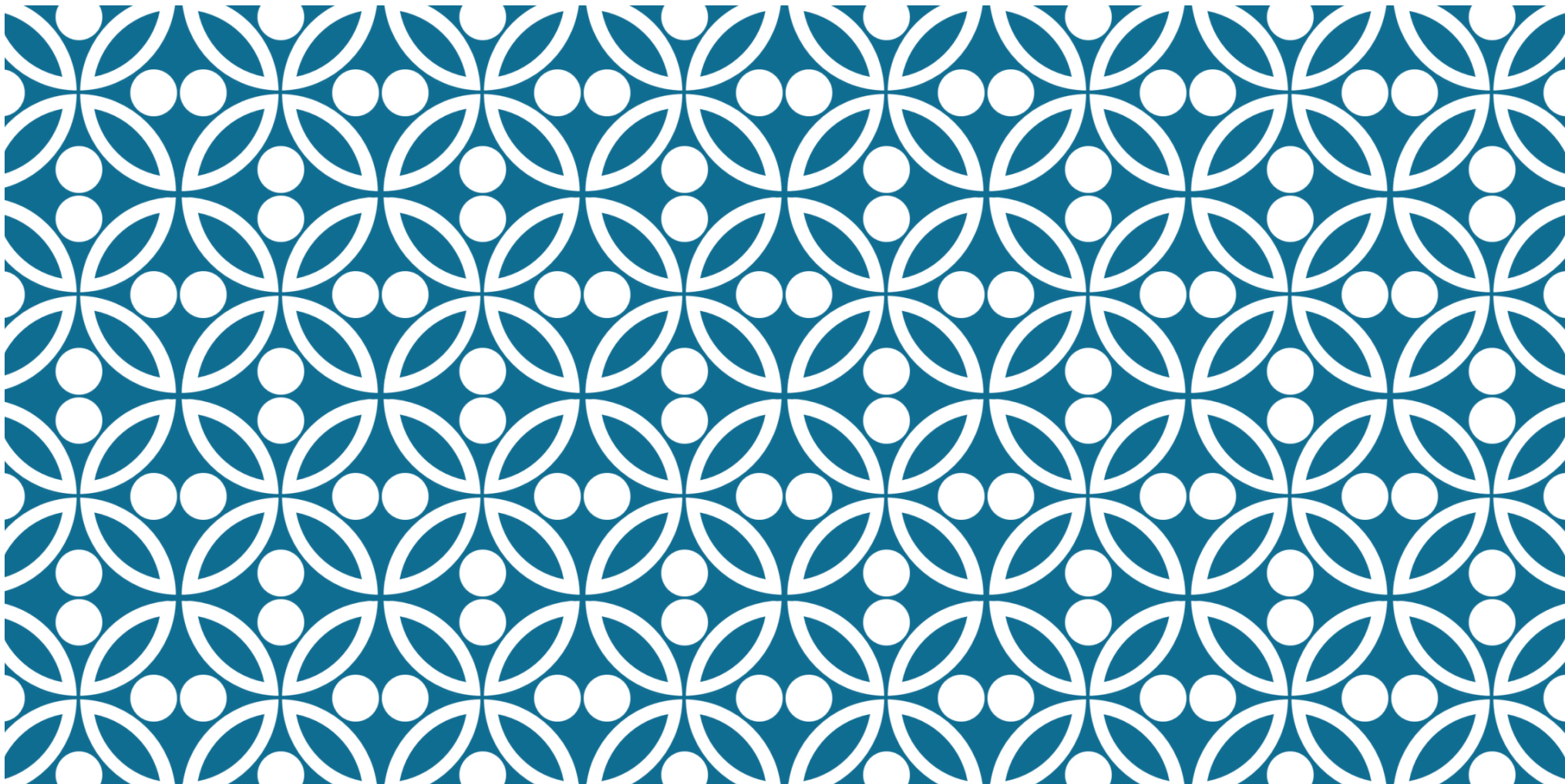
- Dokumen Pedoman Umum dibuat untuk menjadi pedoman dasar bagi semua pihak yang terlibat dalam Program ITDP ini, termasuk di dalamnya adalah pemerintah di tingkat pusat, propinsi, dan daerah, serta pihak swasta dan masyarakat umum.

## 2. Dokumen Manual Pengelolaan Program (MPP)

- Dokumen Manual Pengelolaan Program (MPP) lebih disusun sebagai pedoman untuk implementing agencies (Kementerian Pariwisata, Kementerian PUPR, dan BKPM) dan executing agency (Kementerian PUPR) yang menangani Program Pinjaman Luar Negeri ini.

# PERBANDINGAN DOKUMEN PEDUM DAN MPP

Kategori	Pedoman Umum (Pedum)	Manual Pengelolaan Program (MPP)
<b>Peruntukan</b>	Semua Pihak yang terlibat dan tertarik terhadap program ITDP	<ul style="list-style-type: none"><li>• Executing Agencies</li><li>• Implementing Agency</li></ul>
<b>Muatan</b>	1. Gambaran Umum Program	1. Pendahuluan
	2. Komponen program	2. Gambarn Umum
	3. Hasil dan Indikator Kunci	3. Organisasi Program
	4. Pembiayaan Program	4. Pengelolaan Keuangan
	5. Organisasi dan Tata Laksana Penyelenggaraan Program	5. Pengadaan Barang dan Jasa
	6. Ketentuan Penyelenggaraan	6. Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
	7. Pengelolaan Lingkungan dan sosial	7. Pengendalian Program
	8. Monitoring dan Evaluasi	8. Pengarsipan Dokumen
		9. Ketentuan Perubahan



# DOKUMEN PEDOMAN UMUM

# BAB 1. GAMBARAN UMUM

<b>ISI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Latar Belakang:</b> Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk mempercepat pembangunan sepuluh destinasi pariwisata prioritas, yang dituangkan di dalam Program Prioritas Nasional Pembangunan Pariwisata Indonesia (PPNPPI), dengan tiga destinasi prioritas.</li><li>▪ <b>Tujuan program</b> ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan pariwisata, meningkatkan keterkaitan ekonomi lokal dengan pariwisata, dan mendorong investasi swasta di tiga destinasi pariwisata prioritas tersebut</li><li>▪ <b>Penerima Manfaat:</b> Program ITDP akan memberikan manfaat spesifik sesuai target masing-masing komponen, dan juga manfaat secara umum bagi masyarakat luas</li></ul>
<b>STATUS</b>	SELESAI
<b>PENDING ISSUES</b>	-

# BAB 2. KOMPONEN PROGRAM

<b>ISI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Penjelasan Empat Komponen Program ITDP:</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Komponen 1: Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pengembangan pariwisata terpadu dan berkelanjutan;</li><li>• Komponen 2: Meningkatkan kualitas jalan yang relevan dengan pariwisata dan akses pelayanan dasar;</li><li>• Komponen 3: Mendorong partisipasi lokal dalam perekonomian sektor pariwisata; dan</li><li>• Komponen 4: Meningkatkan lingkungan yang kondusif untuk masuknya investasi swasta dan usaha ke sektor pariwisata.</li></ul></li></ul>
<b>STATUS</b>	SELESAI
<b>PENDING ISSUES</b>	-

# BAB 3. HASIL DAN INDIKATOR KUNCI

ISI	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Memuat struktur kerangka hasil program</b> secara umum dan per-komponen (<a href="#">gambar</a>)</li><li>• <b>Indikator dan target capaian</b> Program secara umum dan per komponen (<a href="#">gambar</a>)</li></ul>
STATUS	selesai
PENDING ISSUES	-



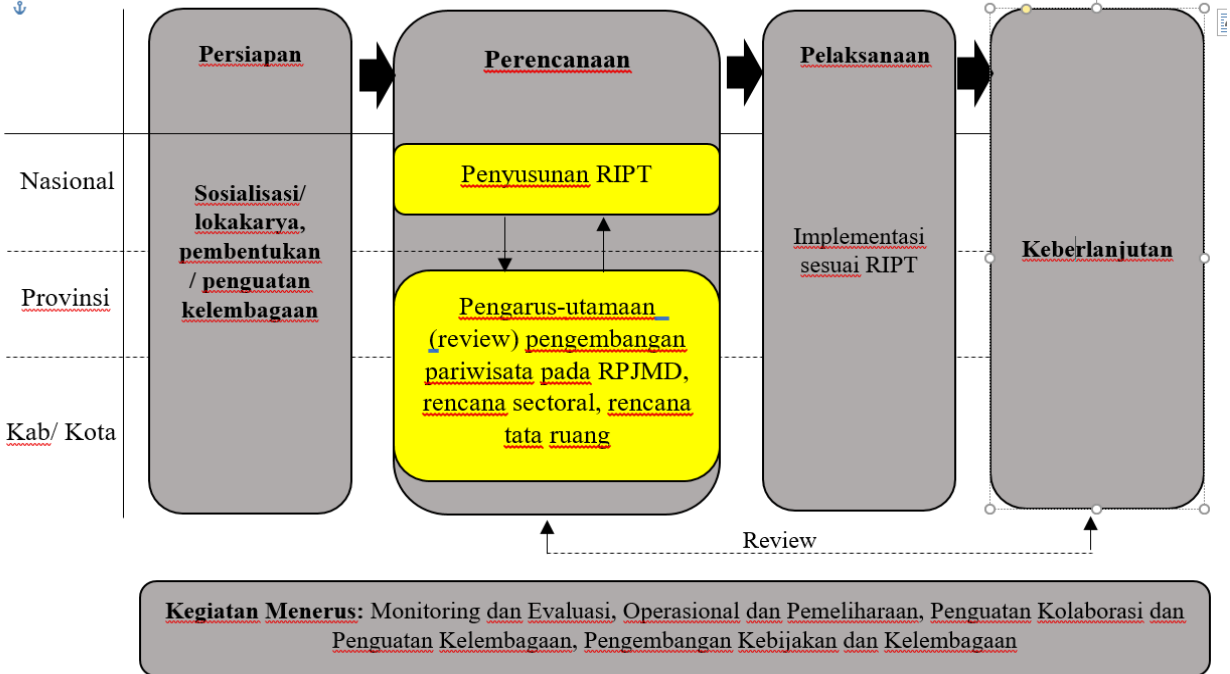
# BAB 4. PEMBIAYAAN PROGRAM

ISI	<ul style="list-style-type: none"><li>• Membahas <b>sumber pendanaan program</b> (APBN/APBD dan Loan) dan <b>usaha untuk memastikan ketersediaan anggaran</b> melalui perencanaan anggaran di tiap tingkat pemerintahan</li><li>• <u><a href="#">(Table Pembiayaan Program)</a></u></li></ul>
STATUS	SELESAI
PENDING ISSUES	-

# BAB 5. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

<b>ISI</b>	<p>Membahas struktur kelembagaan program (<a href="#">gambar</a>), yaitu:</p> <p><b>a. Struktur Koordinasi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Tingkat Pusat (tim pengarah, tim pelaksana, dan tim teknis);</li><li>2) Tingkat Provinsi dan Kab/Kota ( Pokja Destinasi Pariwisata dan penjabaran tugasnya)</li><li>3) Destinasi Wisata (Badan Otorita)</li></ol> <p><b>b. Struktur Pelaksana Program</b> CPMU dan CPIU</p> <p><b>c. Dukungan Pengelolaan Program (PMS)</b></p>
<b>STATUS</b>	SELESAI
<b>PENDING ISSUES</b>	Menunggu Nomor Surat Keputusan Menteri PUPR terkait CPMU dan CPIU

# BAB 6. PENYELENGGARAAN PROGRAM

<p><b>ISI</b></p>	<p>Membahas tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan Program</p>  <p><b>Kegiatan Menerus:</b> <u>Monitoring dan Evaluasi</u>, <u>Operasional dan Pemeliharaan</u>, <u>Penguatan Kolaborasi dan Penguatan Kelembagaan</u>, <u>Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan</u></p>
<p><b>STATUS</b></p>	<p>SELESAI</p>
<p><b>PENDING ISSUES</b></p>	<p>-</p>

# BAB 7. KETENTUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM

ISI	<p><b>Ketentuan untuk penyelenggaraan program</b> ini meliputi poin-poin sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Program lintas Kementerian/Lembaga dan sektor</li><li>2) Mengacu pada perumusan Rencana Induk Pariwisata Terpadu (RIPT).</li><li>3) Mengacu pada RIPT dengan pengecualian</li><li>4) Berorientasi “<i>outcome</i>”</li><li>5) Berbasis pada partisipasi lokal</li><li>6) Pengarusutamaan pengelolaan lingkungan dan sosial, dan kesetaraan gender</li></ol> <p>(<a href="#">bagan penyelenggaraan program</a>)</p>
STATUS	SELESAI
PENDING ISSUES	-

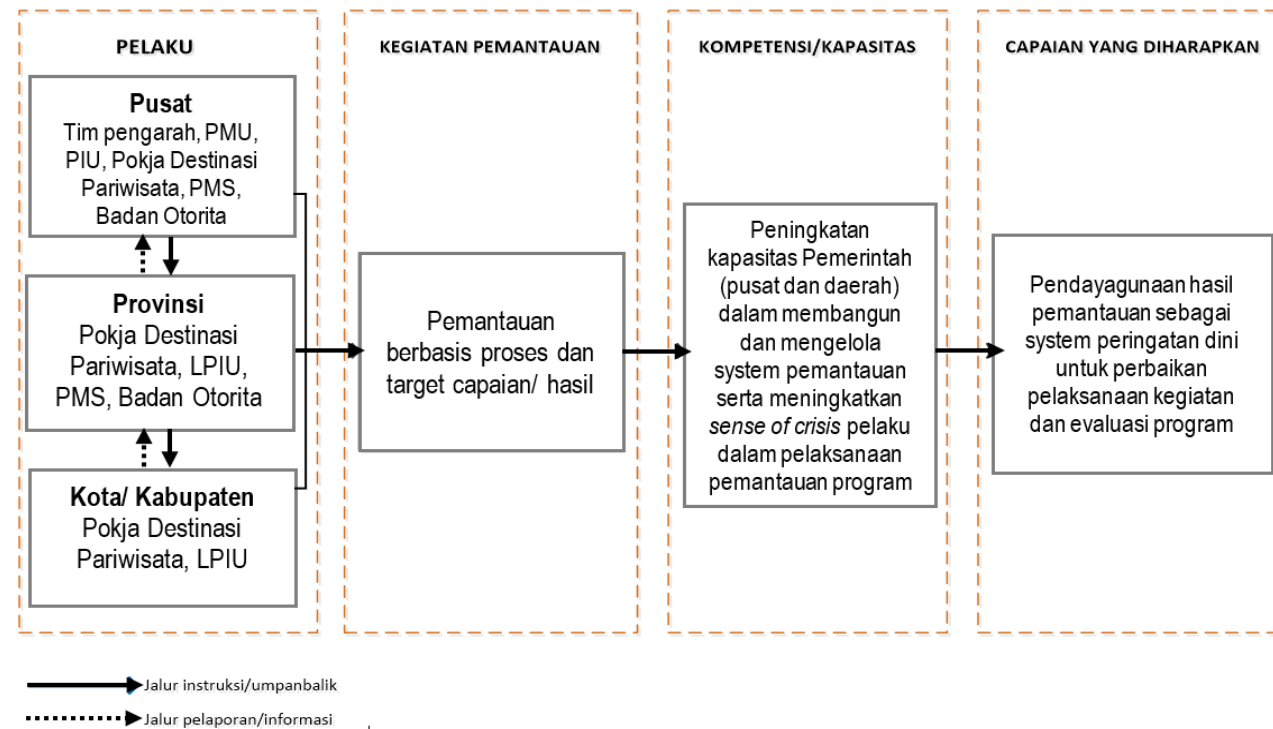
# BAB 8. PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

ISI	<p>Meliputi prinsip dasar dan prinsip khusus pengamanan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Prinsip dasar</b> di antaranya meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kegiatan dalam program ini harus menghindari dan meminimalisasi dampak negatif, dan menghindari pengadaaan lahan dan pemukiman kembali, serta dampak negatif terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA)</li><li>2. Setiap kegiatan dalam Program ini harus sesuai dengan RTRW Kab/Kota dan menghindari kawasan lindung dan konservasi</li><li>3. Setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif lingkungan dan sosial harus disertai dengan rencana untuk memitigasi dan mengatasi dampak tersebut</li></ol></li><li>• <b>Prinsip Khusus</b> di antaranya meliputi prinsip:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan Benda Cagar Budaya</li><li>2. Pengelolaan Lahan dan Pemukiman Kembali</li><li>3. Pengelolaan Masyarakat Hukum Adat (MHA)</li><li>4. Pengelolaan Resiko Bencana</li></ol></li></ul>
STATUS	SELESAI
PENDING ISSUES	-

# BAB 9. MONITORING DAN EVALUASI

**ISI**

Membahas mengenai **pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan workshop Program**

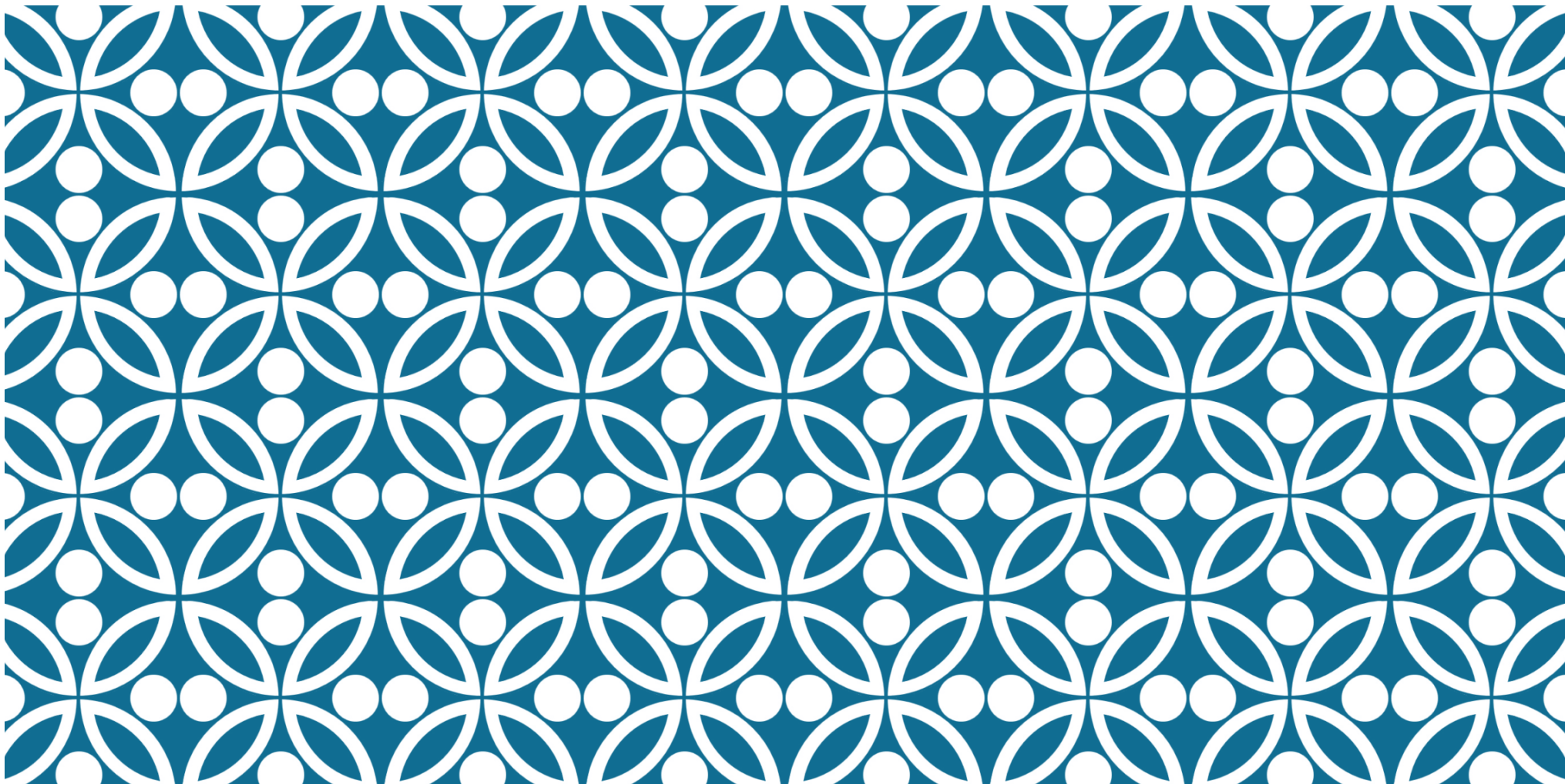


**STATUS**

**SELESAI**

**PENDING ISSUES**

-



**DOKUMEN MANUAL  
PENGELOLAAN PROGRAM (MPP)**

**2**

# BAB I. PENDAHULUAN MPP

<b>ISI</b>	<p>Penjelasan Mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Tujuan</b> Manual Pengelolaan Program (MPP): Disusun sebagai Pedoman bagi semua pelaksana dan pengambil keputusan dalam mengelola, memonitor, mengadministrasikan dan mengendalikan pelaksanaan Program ITDP agar dapat tercapai secara <u>efektif dan efisien</u> serta menganut <u>azas transparansi dan akuntabilitas</u></li><li><b>2. Urgensi disusunnya MPP :</b><ol style="list-style-type: none"><li>a) Agar terbentuknya kesamaan pandang antara pihak – pihak yang terlibat di dalam proyek mengenai peran yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan hingga indikator yang harus dicapai oleh program</li><li>b) Agar adanya standar atas pencapaian setiap komponen program</li><li>c) Agar dicapainya kemudahan bagi pihak – pihak yang terlibat dalam program</li></ol></li></ol>
<b>STATUS</b>	<b>Selesai</b>
<b>PENDING ISSUES</b>	-



# BAB II. GAMBARAN UMUM MPP

ISI	<p>Penjelasan Mengenai:</p> <p><b>1.Latar Belakang Program</b> Pengembangan Infrastruktur Terpadu Pada KSPN (ITDP): Agar dilakukannya percepatan program pengembangan pariwisata terpadu dan berkelanjutan pada sepuluh daerah tujuan wisata yang menjadi prioritas pembangunan, khususnya di 3 (tiga) lokasi prioritas yaitu KSPN Danau Toba, KSPN Borobudur dan KSPN Lombok.</p> <p><b>2.Tujuan Program</b> Pengembangan Infrastruktur Terpadu Pada KSPN (ITDP):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a)Meningkatnya kinerja pada indikator “pariwisata berkelanjutan”</li><li>b)Tercapainya jumlah penerima manfaat dari peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan dasar yang relevan dengan pariwisata</li><li>c)Meningkatnya kepuasan masyarakat dengan upaya mempromosikan partisipasi lokal dalam ekonomi pariwisata</li><li>d)Meningkatnya Nilai investasi swasta di sektor pariwisata</li></ul>
STATUS	Selesai
PENDING ISSUES	-

# BAB III. ORGANISASI PADA PROGRAM ITDP

<b>ISI</b>	<p>Penjelasan Mengenai:</p> <p><b>1.Organisasi Program</b> Pengembangan Infrastruktur Terpadu Pada KSPN (ITDP): Secara umum struktur organisasi program terdiri dari 3 bagian yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.<u>struktur koordinasi program (Steering Committee),</u></li><li>2.<u>struktur pelaksana (CPMU/CPIU), dan</u></li><li>3.<u>struktur pendukung pengelolaan program (PMS Consultant).</u></li></ol> <p>2.Struktur Organisasi CPMU/CPIU: Secara umum, Struktur Organisasi CPMU/CPIU dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.(i) Kepala CPMU (Kepala BPIW, Kemen PUPR);</li><li>2.(ii) Wakil Kepala CPMU terdiri dari unsur-unsur di Kementerian Pariwisata, BKPM dan Kementerian PUPR;</li><li>3.(iii) CPIU.</li></ol> <p>Bagan Organisasi dapat dilihat <a href="#">disini</a></p>
<b>STATUS</b>	Selesai
<b>PENDING ISSUES</b>	Menunggu SK Menteri PUPR

# BAB IV. PENGELOLAAN KEUANGAN

<b>ISI</b>	<p>Memuat penjelasan mengenai:</p> <p><b>1. Tim Pengelolaan keuangan</b> dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu: (a) <u>Tim Pengelolaan Keuangan pada Kepala CPMU/ (BPIW)</u> yang lebih bersifat koordinatif dan <i>me-monitoring</i> kegiatan dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan pada Program <i>Loan</i> ITDP ini; (b) Tim Pengelolaan Keuangan di CPIU.</p> <p><b>2. Tata cara penganggaran</b> yang ditetapkan pada Program ini mengikuti tata cara yang tertuang di Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.</p> <p><b>3. Penyusunan <i>Annual Working Program (AWP)</i></b>: AWP merupakan dokumen perencanaan program dan anggaran per tahun untuk Program ITDP secara keseluruhan.</p> <p><b>4. Penyusunan <i>Interim Financial Report (IFR)</i></b> : IFR merupakan laporan keuangan per tiga bulanan yang wajib diberikan kepada Pemerintah Indonesia kepada Bank Dunia.</p> <p><b>5. Tata Cara Audit</b> : Prosedur audit pelaksanaan Program ITDP ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).</p>
<b>STATUS</b>	Selesai
<b>PENDING ISSUES</b>	-

# BAB V. PENGADAAN BARANG DAN JASA

<b>ISI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa</b> mengacu pada:<ol style="list-style-type: none"><li>1. <u>Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010</u> tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres PBJ);</li><li>2. <u>Bank's Guidelines Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits and Loans by World Bank Borrowers</u> bulan Januari 2011;</li><li>3. <u>Bank's Guidelines Procurement of Goods, Works, and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits and Loans</u> bulan Januari 2011.</li></ol></li><li>2. Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Konsultasi</li><li>3. Tata Cara Pengadaan Konstruksi</li></ol>
<b>STATUS</b>	Selesai
<b>PENDING ISSUES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018</u> tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres PBJ) <b>belum dapat diterapkan pada Program ini</b> karena masih dalam tahap <i>review</i> di Bank Dunia.</li><li>• Penggunaan SPSE dalam proses pelelangan dapat dilakukan pada <i>International Competitive Bidding (ICB)</i> hanya untuk pekerjaan Jasa konsultasi. Sedangkan pengadaan barang, pekerjaan Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya dalam konteks ICB masih dilakukan secara <b>manual</b> sampai SPSE dapat mengakomodasi pengadaan tersebut.</li><li>• Pengadaan Jasa Konsultasi diluar metode QCBS masih dilakukan secara <b>manual</b> sampai SPSE dapat mengakomodasi proses pengadaan tersebut</li></ul>

# BAB VI. PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

<b>ISI</b>	<p>Menjelaskan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Proses pengelolaan lingkungan dan sosial didalam pelaksanaan Program ITDP</li><li>2. Pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan dan sosial.</li></ol> <p>Para pelaksana Program ITDP mengacu pada Dokumen <i>ESMF</i> untuk meminimalisir dampak lingkungan dan sosial bagi masyarakat di sekitar kawasan destinasi prioritas.</p>
<b>STATUS</b>	Selesai
<b>PENDING ISSUES</b>	-

# BAB VII. PENGENDALIAN PROGRAM

ISI	Penjelasan mengenai : 1. Prosedur <u>monitoring dan evaluasi</u> terhadap pencapaian tujuan program Pengembangan Infrastruktur Terpadu Pada KSPN atau Pengembangan Pariwisata Nasional di tiga destinasi ini. 2. Prosedur Penanganan Keluhan atau Pengaduan (Grievance Redress Mechanism). Bagan penanganan keluhan dapat dilihat <a href="#">disini</a>
STATUS	Selesai
PENDING ISSUES	-

# BAB VIII. PENGARSIPAN DOKUMEN

ISI	Penjelasan mengenai: 1. tata cara pengelolaan, 2. pemeliharaan dan pengendalian dokumen-dokumen penting di dalam pelaksanaan Program ITDP.
STATUS	Selesai
PENDING ISSUES	-

# BAB IX. KETENTUAN PERUBAHAN

ISI	<p>Perubahan terhadap MPP dilakukan antara lain karena adanya perubahan atau amandemen atas Loan Agreement yang dapat terjadi dalam keadaan berikut ini :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perubahan besarnya dana pinjaman.</li><li>2. Perubahan closing date</li><li>3. Perubahan tujuan program atau ruang lingkup proyek untuk mencakup kegiatan serta hal-hal yang sebelumnya tidak termasuk dalam perjanjian, dan/atau sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program yang berpengaruh terhadap MPP.</li></ol>
STATUS	Selesai
PENDING ISSUES	-



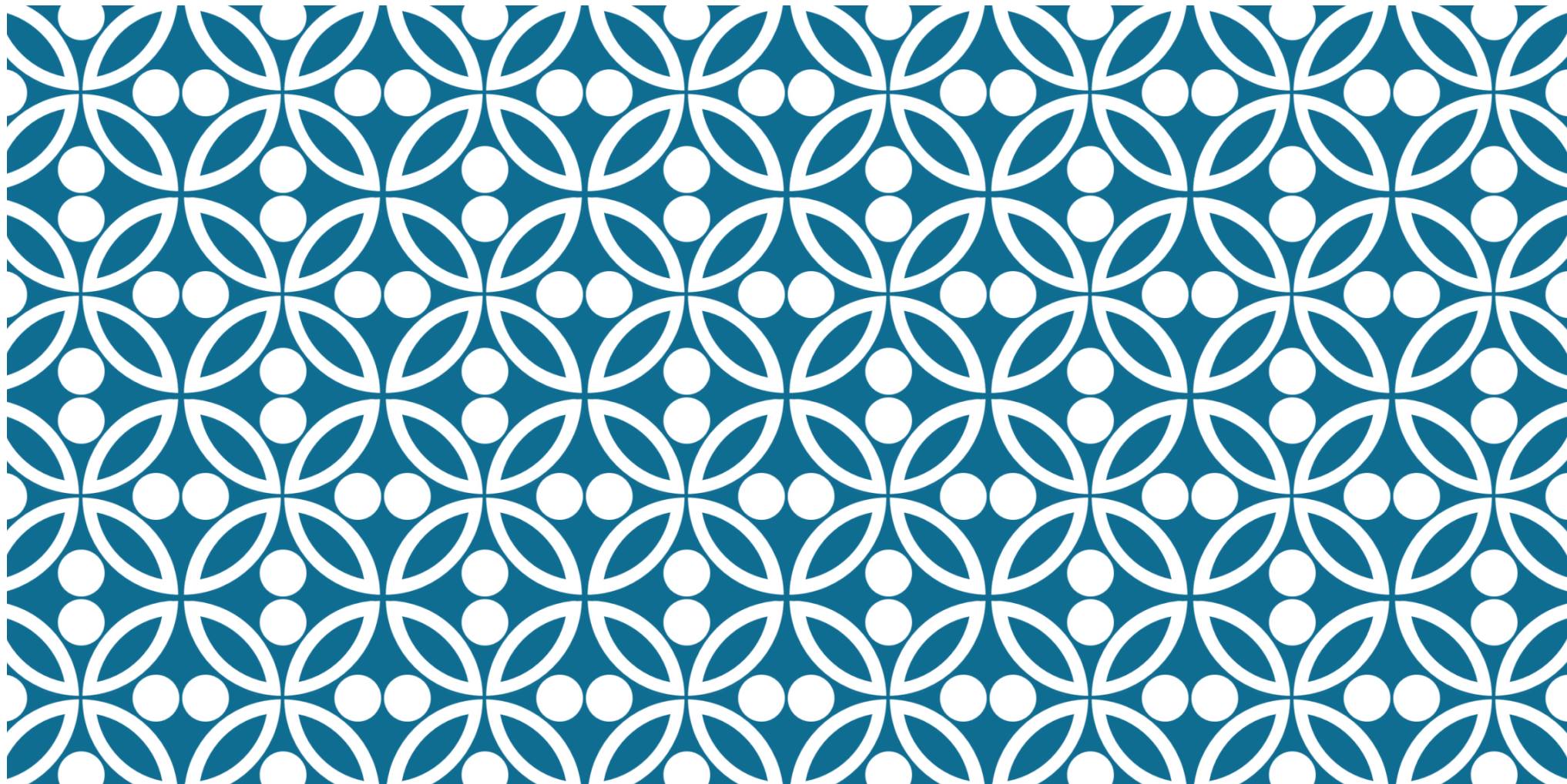
# KESIMPULAN

<b>Pedoman Umum (Pedum)</b>	<b>Status</b>	<b>Manual Pengelolaan Program (MPP)</b>	<b>Status</b>
1. Gambaran Umum Program	V	1. Pendahuluan	V
2. Komponen program	V	2. Gambarn Umum	V
3. Hasil dan Indikator Kunci	V	3. Organisasi Program	V
4. Pembiayaan Program	V	4. Pengelolaan Keuangan	V
5. Organisasi dan Tata Laksana Penyelenggaraan Program	V	5. Pengadaan Barang dan Jasa	V
6. Ketentuan Penyelenggaraan	V	6. Pengelolaan Lingkungan dan Sosial	V
7. Pengelolaan Lingkungan dan sosial	V	7. Pengendalian Program	V
8. Monitoring dan Evaluasi	V	8. Pengarsipan Dokumen	V
		9. Ketentuan Perubahan	V



**TERIMA KASIH**

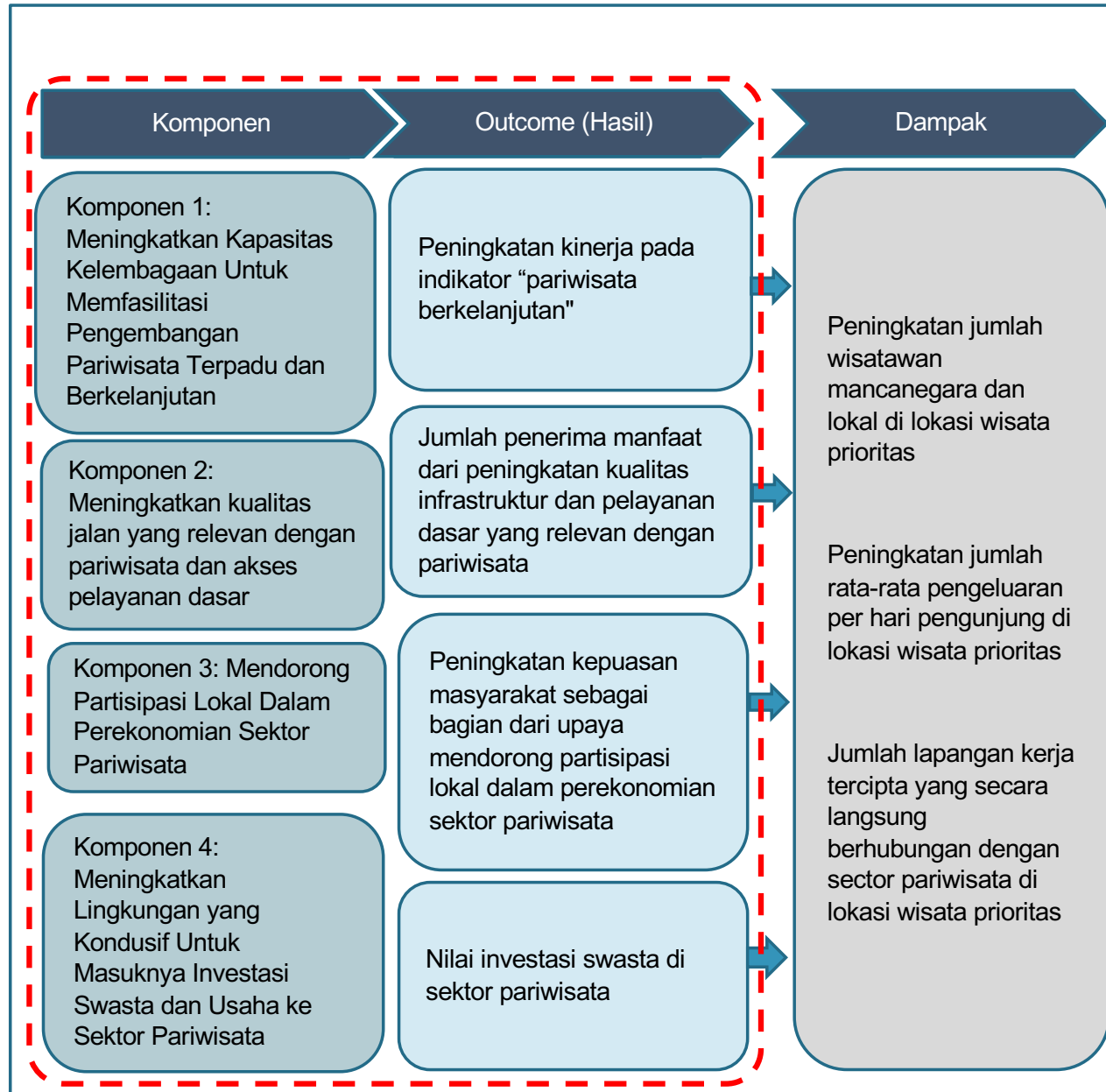




**LAMPIRAN**



# STRUKTUR KERANGKA HASIL PROGRAM

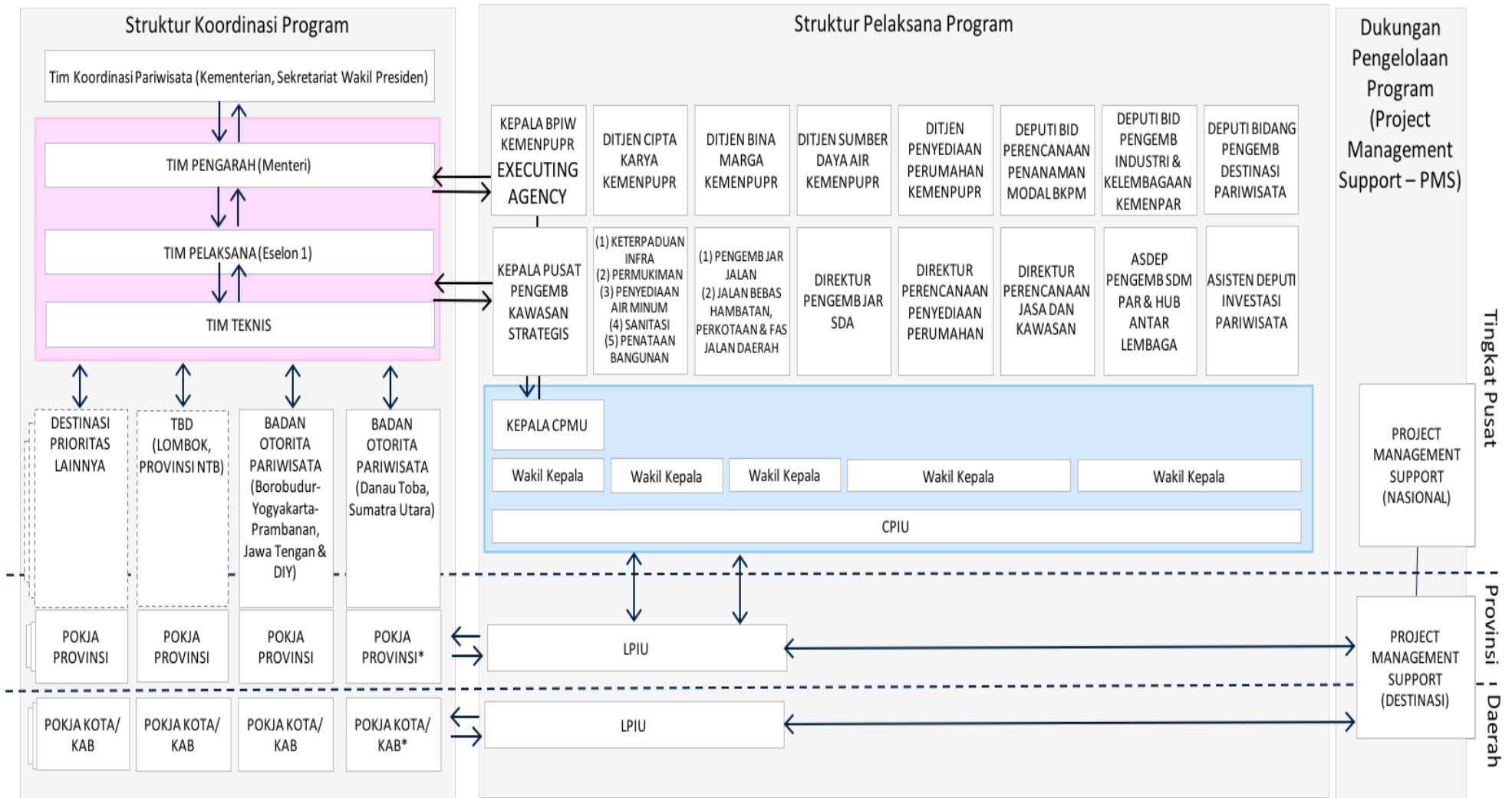


[KEMBALI](#)

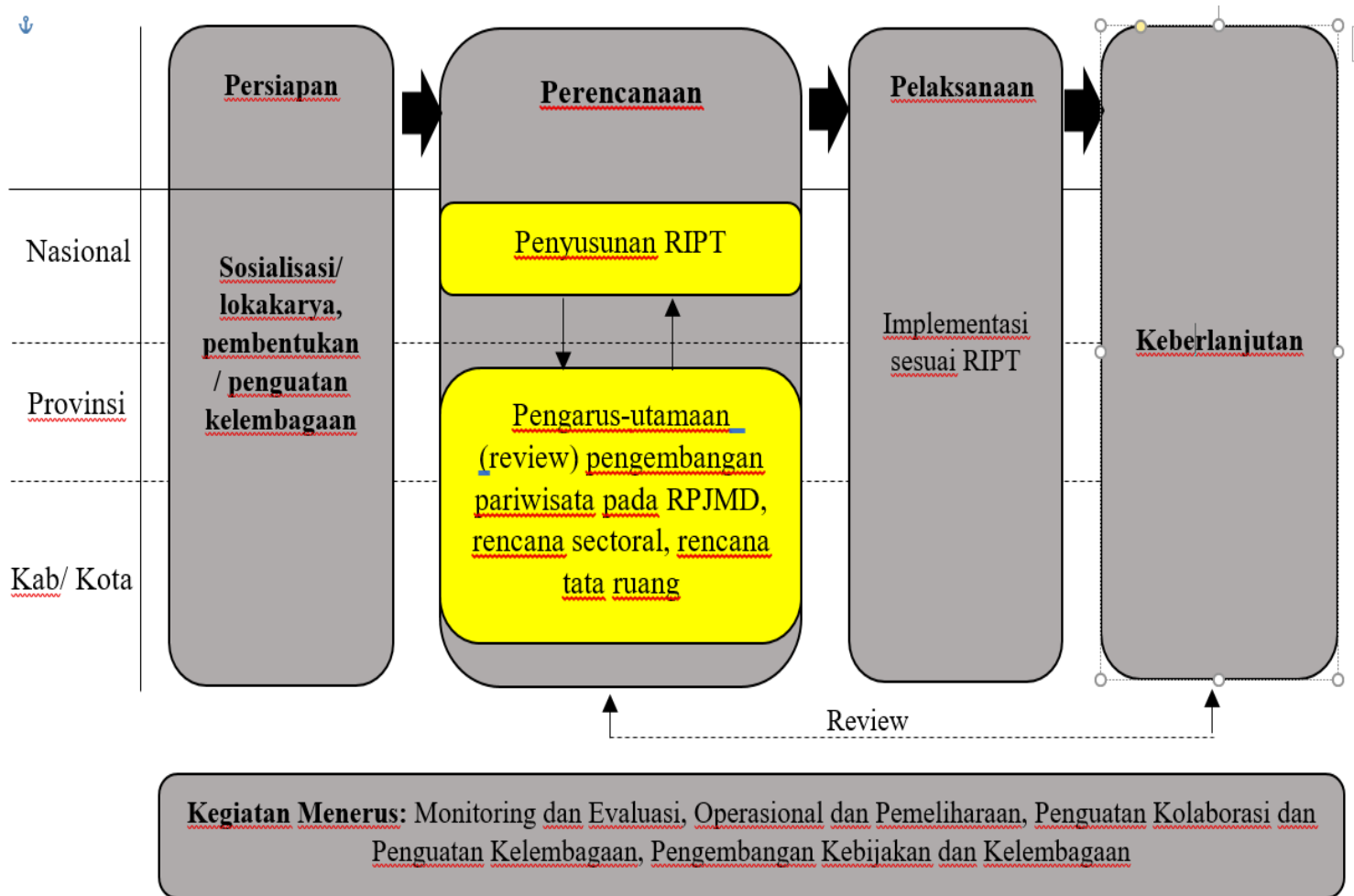
## INDIKATOR PROGRAM BERDASARKAN OUTCOME

No	Indikator Program berdasarkan Outcome (Hasil)	Unit	Data Awal	Target Antara				Target Akhir
				1	2	3	4	
1	<b>Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pengembangan pariwisata terpadu dan berkelanjutan</b>							
	Peningkatan kinerja pada indikator "pariwisata berkelanjutan"	Peningkatan Persentase	0	20	40	60	80	100
2	<b>Meningkatkan kualitas jalan yang relevan dengan pariwisata dan akses pelayanan dasar</b>							
	Jumlah penerima manfaat dari peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan dasar yang relevan dengan pariwisata	Jumlah (orang)	0	352,300	922,400	1,686,400	2,450,100	2,849,500
3	<b>Mendorong partisipasi lokal dalam perekonomian sektor pariwisata</b>							
	Peningkatan kepuasan masyarakat sebagai bagian dari upaya mendorong partisipasi lokal dalam perekonomian sektor pariwisata	Peningkatan Persentase	0	8				20
4	<b>Meningkatkan lingkungan yang kondusif untuk masuknya investasi swasta dan usaha ke sektor pariwisata</b>							
	Nilai investasi swasta di sektor pariwisata (kumulatif)	Jumlah (USD)	32,400,000	82,000,000	167,500,000	256,500,000	349,200,000	421,200,000

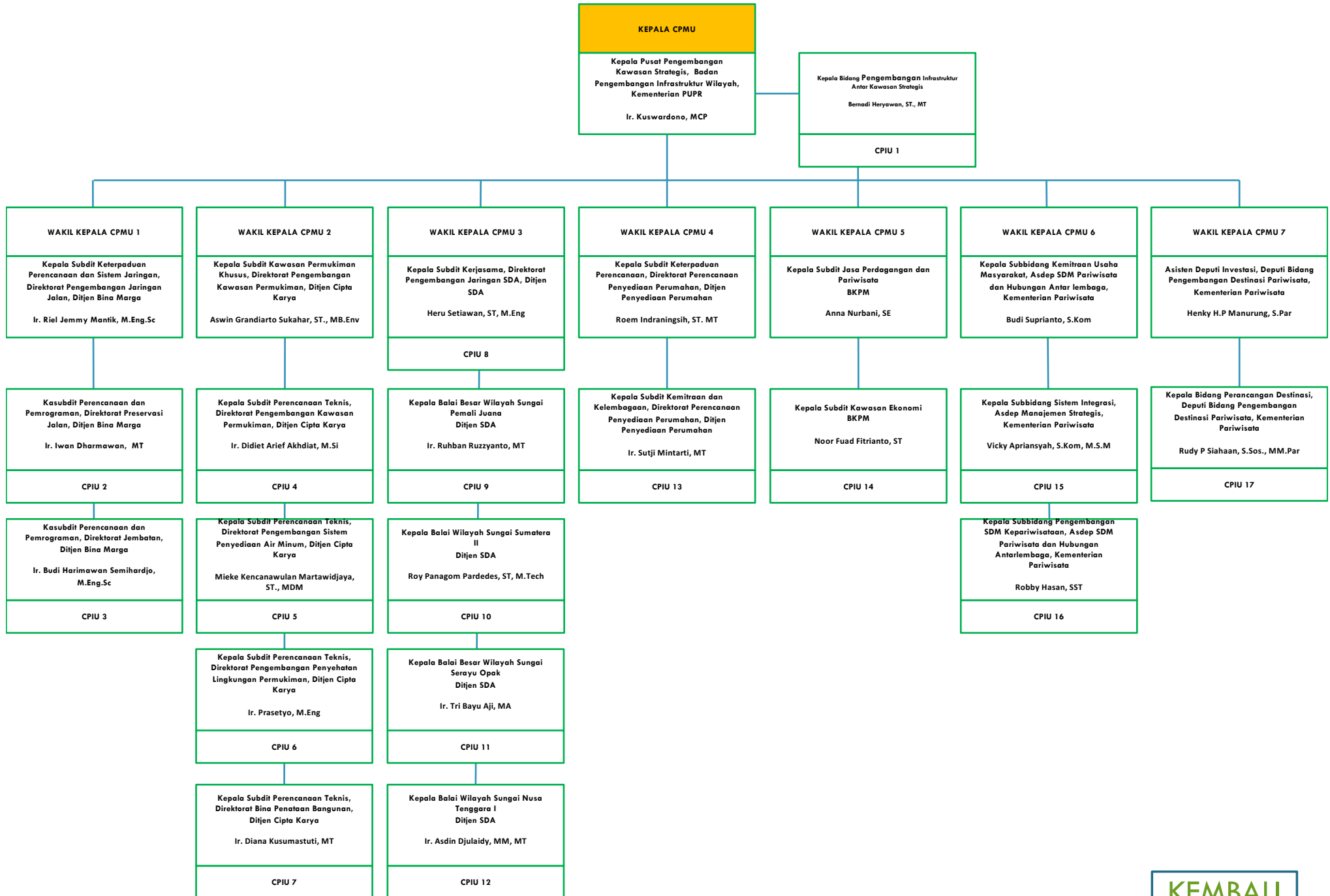
# STRUKTUR KELEMBAGAAN PROGRAM



# Penyelenggaraan Program



# STRUKTUR ORGANISASI CPMU DAN CPIU (dalam proses revisi)





## BAGAN ALUR MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN

